



# PROSIDING PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN (PIT) XVI IKATAN GEOGRAF INDONESIA (IGI)

Banjarmasin 2-3 Nopember 2013



**MEMPERKOKOH KESADARAN SPASIAL  
KEPEMIMPINAN NKRI MENGHADAPI  
TANTANGAN GLOBAL**



Penyelenggara Kegiatan

Ikatan Geograf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan  
Program Studi Pendidikan Geografi-FKIP  
Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen H. Hassan Basry Kotak Pos 87 Banjarmasin 70123

**2013**



Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan XVI  
**IKATAN GEOGRAF INDONESIA**  
Banjarmasin 2-3 Nopember



2013

Katalog Dalam Terbitan; Perpustakaan nasional Indonesia; Memperkokoh Kesadaran Spasial  
Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan Global

**ISBN 978-602-1322-00-0**

Judul Buku : Memperkokoh Kesadaran Spasial Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan  
Global

**Penyusun :**

IKATAN GEOGRAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Perancang Sampul:**

Hasa Noor Hasadi  
Muhammad Zainuddin  
Muhammad Muhaimin

**Editor:**

Prof. Dr. Suratman., M.Sc. (Ketua Umum IGI Pusat)  
Nasruddin, M.Sc. (Ketua Umum IGI Kalimantan Selatan)  
Dr. Asep Karsidi, M.Sc. (Dewan Pembina IGI Pusat)  
Prof. Dr. Aris Poniman (Dewan Pembina IGI Pusat)  
Drs. Wahyu Utomo, M.Si. (Dewan Pembina IGI Provinsi Kalimantan Selatan)

**Penerbit :**

PT. Pro Fajar Jakarta

---

Hak cipta ada pada penulis dan dilindungi Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2002, pasal 72 tentang HAK CIPTA.  
Dilarang memperbanyak buku ini, tanpa ijin dari Penulis dan Penerbit



Kajian Perluasan Sifat Fisik Kekotaan Kota Yogyakarta Di Kawasan Hinterland (Studi Kasus Kawasan Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul) <i>Ahmad Sarwadi., Sri Rum Giyarsih., Retno Widodo Dwi Pramono</i>	503
Informasi Spasial Ruang Hijau Kota Meredam Co2 dan Menghasilkan O2 Kota Semarang <i>Dewi Liesnoor Setyowati</i>	515
Aktivitas dan Pola Kegiatan Penambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara <i>Nasruddin., Doni Stiadi</i>	523
Pengelolaan Wilayah Penambangan Sirtu Berbasis Pada Analisis Erosi-Sedimentasi Tanah (Soil Redistribution) Kasus di DAS Loano Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah <i>Aries Dwi Wahyu Rahmadana., Junun Sartohadi., Danang Sri Hadmoko., Nur Ainun Harlin Pulungan</i>	530
Pemetaan Wilayah Strategis Rawan Konflik Sosial <i>Risma Fadhillah Arsy</i>	542
Evaluasi Pendapatan Masyarakat Pasca Bencana Banjir Lahar di Sub Das Putih Kabupaten Magelang <i>Rosalina Kumalawati., Junun Sartohadi., Rijanta, Rimawan Pradiptyo</i>	552
Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kabupaten Lebak Provinsi Banten <i>M.H. Dewi Susilowati., Tuty Handayani., Ratna Saraswati</i>	558
Pengaruh Aspek Demografis Terhadap Kondisi Lingkungan Permukiman Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya <i>Sulistinah</i>	565
Analisis Agihan Permukiman Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Daerah Sekitar Situs Sangiran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen <i>Dahroni., Baharudin., Syaiful Anwar</i>	570
Optimasi Kelembagaan Pada Pengelolaan Mangrove di Pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten <i>Muzani</i>	574
Meminimalisir Bahaya Banjir di Kota Banjarmasin dengan Peraturan Daerah Rumah Panggung <i>Sulis</i>	586
Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan Di Kawasan Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Kartanegara <i>Nasruddin., Lutfi Muta'ali., Su Ritohardoyo., R. Suharyadi</i>	589
<b>1.4. GEOSTRATEGIS NKRI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL</b>	<b>599</b>

**AKTIVITAS DAN POLA KEGIATAN PENAMBANGAN BATUBARA  
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Nasruddin<sup>1</sup>, Doni Stiadi<sup>2</sup>**

(Staf Pengajar Prodi Pendidikan Geografi FKIP Unlam, Staf pengajar FE Unlam)

**ABSTRAK**

Aktivitas penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan pola sistem terbuka, hal ini dikarenakan karena rata-rata cadangan batubara terletak di atas permukaan. Kedalaman rata-rata dalam aktivitas penambangan batubara yakni 30 m. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi surga investor dalam menanamkan sahamnya di bidang usaha penambangan batubara. Hingga tahun 2011 pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan 655 IUP dan merupakan angka tertinggi se-Indonesia.

Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Tahun 2011 telah mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tertinggi se-Indonesia yakni 655 IUP atau 50,23% dari 1.304 Ijin Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Sektor pertambangan dan penggalian khususnya batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sektor yang paling berperan setelah PDRB dengan migas, hal ini nampak dari sumbangan sektor ini dari Tahun 2008-2010 menunjukkan rata-rata sumbangan mencapai 75,68% atau merupakan sektor primadona kedua setelah migas. Besaran angka bagi hasil dan penerimaan APBD yang disumbangkan oleh sektor pertambangan batubara untuk pendapatan daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan aspek kesejahteraan masyarakatnya. Tipologi kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh badan usaha 99,58% dengan perincian dalam bentuk CV (95,87%), PT (3,71%) dan hanya 0,42% dalam bentuk koperasi. Rata-rata rasio pelaksana kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara tertinggi pada badan usaha PT yakni 1798 ha dari luas total 846.575 ha, CV 89 ha dari luas total 32.733 ha, dan koperasi 87 ha dari total luas 3701 ha.

**Kata Kunci:** Aktivitas, Pola, Penambangan Batubara

**Pendahuluan**

Pertambangan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian sampai dengan pemasaran. secara umum tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari penyelidikan umum (prospeksi), eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, pemasaran dan reklamasi. Dalam pelaksanaannya kegiatan penambangan batubara yang meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut. Kegiatan penambangan batu bara merupakan kegiatan pengambilan batu bara yang meliputi penggalian, pengangkutan dan penimbunan baik pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah.

Pelaksanaan tersebut ditentukan atas bentuk IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang sebelumnya telah mendapatkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Batubara atau WIUP. IUP diberikan oleh menteri/bupati/walikota atas permintaan badan usaha, koperasi atau perseorangan. Aktivitas pertambangan batubara Indonesia sangat dipengaruhi oleh cadangan batubara yang tersedia. Provinsi Kalimantan Timur merupakan sumber cadangan deposit batubara yakni 37,5 milyar ton atau 35,7 % dari seluruh cadangan batubara Indonesia (MP3EI Kalimantan Timur, 2011), dimana Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penambangan dan perijinan terbesar di Inonesia.

Aktivitas penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan pola sistem terbuka, hal ini dikarenakan karena rata-rata cadangan batubara terletak di atas permukaan. Kedalaman rata-rata dalam aktivitas penambangan batubara yakni 30 m. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi surga investor dalam menanamkan sahamnya di bidang usaha penambangan batubara. Hingga tahun 2011 pemerintah daerah



Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan 655 IUP dan merupakan angka tertinggi se Indonesia.

#### Aktivitas Penambangan Batubara Kutai Kartanegara

Aktivitas penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu sektor strategis kedua setelah migas. Penerimaan bagi hasil dari pertambangan batubara pada Tahun 2009 berupa penerimaan dana *landrent* (sewa tanah) yakni terbesar kedua setelah Kutai Barat dengan pendapatan Rp3.390.821.723, dan penerimaan royalti bagi hasil pertambangan batubara terbesar kedua setelah Kutai Timur yakni Rp281.589.592.041. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diukur data PDRB menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian (khususnya migas dan batubara) merupakan sektor strategis dalam menopang pembangunan wilayah. Gambaran peran sektor pertambangan dan penggalian tersebut tersaji pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Distribusi PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2008-2010

PDRB	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)			Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Dengan Migas	103.959.393 81%	89.846.631 76%	98.818.128 74%	27.427.692 76%	27.997.018 75%	29.084.100 74%
Tanpa Migas	24.119.805 19%	28.064.537 24%	35.127.962 26%	8.678.089 24%	9.288.666 25%	10.421.960 26%

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011 (diolah)

Sektor pertambangan dan penggalian khususnya batubara merupakan sektor yang paling berperan setelah PDRB dengan migas, hal ini nampak dari sumbangan sektor ini dari Tahun 2008-2010 menunjukkan rata-rata sumbangan mencapai 75,68% atau merupakan sektor primadona kedua setelah migas, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2008-2010

Lapangan Usaha	2008	2009	2010 *)	Rata-Rata
Pertanian	5,01	6,26	17,83	15,59
<b>Pertambangan &amp; Penggalian</b>	<b>87,87</b>	<b>84,63</b>	<b>54,55</b>	<b>75,68</b>
Industri Pengolahan	1,08	1,3	3,59	3,51
Listrik, Gas, & Air Bersih	0,04	0,05	0,14	0,12
Bangunan	2,6	3,27	9,34	8,10
Perdagangan, H otel, & Restoran	1,99	2,66	8,04	6,64
Pengangkutan & Komunikasi	0,34	0,42	1,21	1,13
Keuangan, Persewaan & jasa Perusahaan	0,31	0,38	1,05	1,03
Jasa - ja s a	0,76	1,03	4,25	2,83

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011 (diolah)

Catatan: \*) angka sementara

Besaran angka bagi hasil dan penerimaan APBD yang disumbangkan oleh sektor pertambangan batubara untuk pendapatan daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan aspek kesejahteraan masyarakatnya dimana Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 112.560 jiwa pada Tahun 2006 (Kotijah dan Rusmiyati, 2007), di samping itu Tahun 2010 merupakan wilayah dengan jumlah desa belum berlistrik terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Timur yakni 40 desa yang belum menerima penerangan PLN (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2011). Selain itu pada Tahun 2012 sebagai penerima beras miskin (*raskin*) terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yakni 2200 ton untuk 30.095 kepala keluarga atau 19 % dari 159.757 total

kepala keluarga (<http://kaltim.antaranews.com>). Permasalahan empirik yakni terdapatnya kesenjangan pada aspek pertumbuhan ekonomi secara makro (wilayah) sejalan dengan teori kutub pertumbuhan (*growth pole*) oleh Francois Perroux, Albert O. Hirschman, dan Myrdal (dalam Muta'ali, 2012) dengan strategi pertumbuhan ekonomi melalui proses industrialisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, namun dari aspek mikro yakni level masyarakat belum tercapai.

Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Tahun 2011 telah mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tertinggi se-Indonesia yakni 655 IUP atau 50,23% dari 1.304 Ijin Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur (JATAM, 2011 dan Regional Kompas.com, 2012). Data pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikumpulkan dari berbagai sumber dari Tahun 1996 hingga Tahun 2009 mengalami kecenderungan peningkatan aktivitas luas usaha pertambangan, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

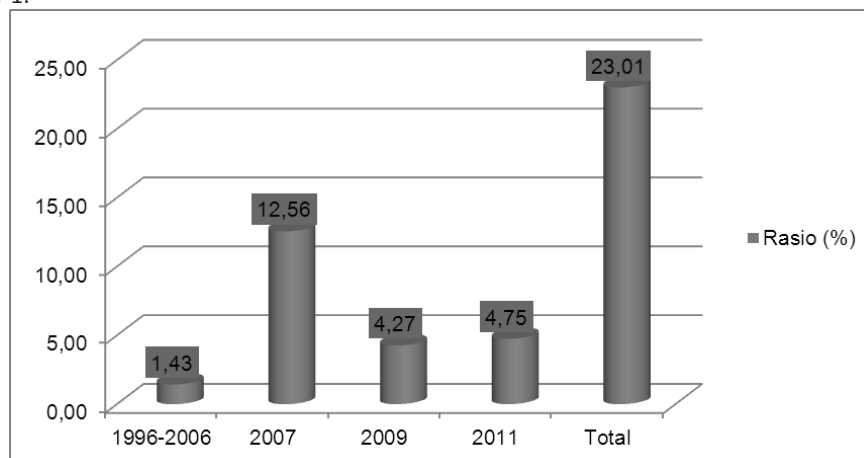
**Tabel 3.** Gambaran Luas Usaha Pertambangan Batubara (ha) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1996-2011

Tahun	IUP Peninjauan	IUP Eksplorasi	IUP Eksploitasi	Total (ha)
1996-2006	0	0	39.105,56	39.105,56
2007	344.011,53	179.039,34	342.483,55	865.534,42
2009	532.369,00	319.507,00	116.352,00	968.228,00
2011	380.893,00	372.731,00	129.385,00	883.009,00
Total	1.257.273,53	871.277,34	627.326,11	2.755.876,98

Sumber data:

1. Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Kutai Kartanegara, 1996-2006
2. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BLHD), 2007
3. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2010
4. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, 2012

Peningkatan aktivitas eksploitasi oleh usaha pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana pada Tabel 2 di atas memberikan informasi bahwa aktivitas pertambangan batubara yang telah dieksploitasi hingga Tahun 2010 yakni 627.326,11 ha atau terdapat persentase rasio 23,01% dari total luas wilayah yakni 2.726.310 ha atau 27.263,10 km<sup>2</sup> dan telah beralihfungsi untuk kegiatan pertambangan batubara. Kondisi ini akan mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan terus berlangsungnya aktivitas penambangan batubara. Rasio luas eksploitasi pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Rasio Luas Eksploitasi Tambang Batubara dengan Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1996-2006, 2007, 2009-2011

#### Tipologi Kegiatan Penambangan Batubara Kutai Kartanegara

Tipologi kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh luasan (ha) badan usaha 99,58% dengan perincian dalam bentuk CV (95,87%), PT (3,71%) dan hanya 0,42% dalam bentuk koperasi. Tahun 2011 yang diolah dari data Jaringan Advokasi Tambang Provinsi Kalimantan Timur diketahui bahwa IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 655. Angka ini merupakan jumlah yang sangat fantastis dalam tahun 2011 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Luas aktivitas kegiatan tambang didominasi dalam bentuk badan usaha (CV) 276 IUP dengan luasan 846.575 ha, kemudian PT (32.733 ha) dan Koperasi hanya 3.701 ha.

Tabel 4. Jumlah dan Luas (Ha) Masing-Masing Satuan Tipologi Pelaksana Kegiatan Tambang

No	Tipologi Pelaksana Kegiatan Tambang	Jumlah (IUP)	Luas (Ha)	%
1	PT	337	32.733	3,71
2	CV	276	846.575	95,87
3	Koperasi	42	3.701	0,42
	<b>Jumlah</b>	<b>655</b>	<b>883.009</b>	<b>100</b>

Sumber: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, 2011 (diolah)

Tabel 4 di atas khususnya pada jumlah IUP Koperasi merupakan jumlah yang paling rendah yakni 42 IUP dengan luas 3.701 ha (0,42%). Kondisi ini menggambarkan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada wilayah Kutai Kartanegara belum mampu terlaksana dengan baik pada bidang pertambangan batubara. Selain itu juga nampak fenomena asas manfaat dari bentuk badan usaha (CV/PT) pada saat menjelang menutup kegiatan pertambangan, hak perijinan diserahkan pada koperasi sehingga tanggungjawab reklamasi tentunya akan menjadi tanggungjawab koperasi. Kondisi ini menjadi sangat sulit karena aspek keuangan yang dimiliki koperasi tentunya tidak sebesar yang dimiliki oleh badan usaha (CV/PT). Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus koperasi di wilayah Kecamatan Muara Jawa menjelaskan bahwa koperasi hanya dapat bagian sisa dari perusahaan yang telah menambang sebelumnya.

“koperasi kami hanya beberapa kali melakukan penjualan dan setelah itu kami bagi dengan anggota dengan rata-rata pembagian 2 juta dari 30 anggota, jika suruh untuk melakukan reklamasi kita akan laksanakan semampu keuangan koperasi kami”

(Wawancara tanggal 10 Juli 2012)

Permasalahan serius yang sering menjadi liputan media adalah aspek ekologis seperti banjir dan longsor, namun jika dikaji secara mendalam sebagaimana hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reklamasi yang relatif tidak dilaksanakan berawal dari lemahnya sistem administrasi dan penegakan aturan, sehingga proses pemindahan perijinan sangat longgar dari badan usaha yang satu ke badan usaha lainnya.



Gambar 2. Aktivitas Tambang Batubara yang ditinggalkan tanpa Reklamasi di Wilayah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah perijinan kegiatan tambang batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pada tahun 2011 yakni 655 IUP dengan perincian menurut tahap perijinan yakni tingkat PU (Penyelidikan Umum) berjumlah 176 meningkat pada tahap eksplorasi dengan jumlah 311 dan selanjutnya pada tahap eksploitasi yakni berjumlah 168 ijin (lihat Tabel 5). Luasan pertambangan dari aspek tipe perijinan yakni 43, 14% pada tahap PU, 42,21% pada tahap eksplorasi dan 25,65% pada tahap eksploitasi (Tabel 6).

Tabel 5. Jumlah Pelaksana Kegiatan Tambang Menurut Jumlah Aktivitas (PU, Eksploitasi, dan Eksporasi)

No	Tipologi Pelaksana Kegiatan Tambang	PU	Eksplorasi	Eksploitasi	Jumlah (IUP)
1	PT	131	139	67	337
2	CV	45	158	73	276
3	Koperasi	-	14	28	42
	<b>Jumlah</b>	<b>176</b>	<b>311</b>	<b>168</b>	<b>655</b>
	<b>%</b>	<b>26,87</b>	<b>47,48</b>	<b>25,65</b>	<b>100</b>

Sumber: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, 2011 (diolah)

Terdapatnya jumlah perijinan tahap PU yang lebih kecil dibandingkan jumlah pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sangat dimungkinkan pada aspek administrasi perijinan, sebagaimana yang diutarakan salah seorang pelaku kegiatan tambang (penambang) di wilayah Kecamatan Samboja yang mengutarakan bahwa masalah administrasi dalam dunia tambang relatif bersifat informal.

“kegiatan penambangan di Kukar ini sangat dipengaruhi oleh orang dalam, jika kenal atau upeti layak maka tidak perlu PU mungkin langsung ijin eksplorasi dikeluarkan, tidak heran IUP di wilayah sini semuanya ada tangan kuatnya”

(Wawancara tanggal 12 Juli 2012)



**Tabel 6.** Jumlah Pelaksana Kegiatan Tambang Menurut Luas Aktivitas (Ha) (PU, Eksploitasi, dan Eksporasi)

No	Tipologi Pelaksana Kegiatan Tambang	Luas (Ha)			
		PU	Eksplorasi	Eksploitasi	Total (Ha)
1	PT	371.216	354.893	120.466	846.575
2	CV	9.677	16.586	6.470	32.733
3	Koperasi	-	1.252	2.449	3.701
	<b>Jumlah</b>	<b>380.893</b>	<b>372.731</b>	<b>129.385</b>	<b>883.009</b>
	<b>%</b>	<b>43,14</b>	<b>42,21</b>	<b>14,65</b>	<b>100</b>

Sumber: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, 2011 (diolah)

Jumlah rata-rata rasio pelaksana kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara tertinggi pada badan usaha PT yakni 1798 ha, CV 89 ha, dan koperasi 87 ha. Angka ini mengindikasikan bahwa badan usaha PT dengan total luas 846.575 ha adalah aktivitas terluas secara rata-rata dibandingkan CV (32.733 ha) dan Koperasi (3.701 ha).

**Tabel 7.** Rasio Pelaksana Kegiatan Tambang Menurut Aktivitas Perijinan (ha) (PU, Eksploitasi, dan Eksporasi)

No	Tipologi Pelaksana Kegiatan Tambang	Rasio		
		PU	Eksplorasi	Eksploitasi
1	PT	2834	2553	1798
2	CV	215	105	89
3	Koperasi	0	89	87
	<b>Jumlah</b>	<b>2164</b>	<b>1198</b>	<b>770</b>

Sumber: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, 2011 (diolah)

Tingginya angka jumlah IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau lemahnya penegakan hukum khususnya dalam pelaksanaan reklamasi pasca tambang akan berdampak pada lingkungan fisik yang akhirnya pada berdampak pada lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Syahra (2003) pada penambangan batubara di Sawah Lunto menunjukkan bahwa modal sosial belum menunjukkan kondisi yang kondusif, dimana tingkat saling percaya dan rasa kebersamaan antara sesama warga masih tergolong rendah meskipun telah dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan. Selanjutnya Li (2011) pada penambangan batubara di Distrik Mentougou Beijing, China menyatakan bahwa telah terjadi kerugian dengan hilangnya ekologi /lingkungan akibat penambangan batubara jauh lebih tinggi daripada manfaat ekonomisnya.

#### Kesimpulan

1. Sektor pertambangan dan penggalian khususnya batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sektor yang paling berperan setelah PDRB dengan migas, hal ini nampak dari sumbangan sektor ini dari Tahun 2008-2010 menunjukkan rata-rata sumbangan mencapai 75,68% atau merupakan sektor primadona kedua setelah migas
2. Besaran angka bagi hasil dan penerimaan APBD yang disumbangkan oleh sektor pertambangan batubara untuk pendapatan daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan aspek kesejahteraan masyarakatnya
3. Tipologi kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh badan usaha 99,58% dengan perincian dalam bentuk CV (95,87%), PT (3,71%) dan hanya 0,42% dalam bentuk koperasi.
4. Rata-rata rasio pelaksana kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara tertinggi pada badan usaha PT yakni 1798 ha dari luas total 846.575 ha, CV 89 ha dari luas total 32.733 ha, dan koperasi 87 ha dari total luas 3701 ha.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Li Feng, Xusheng Liu, Zhao a, Beibei Wang, Jiasheng Jin a, Hu a. 2011. *Evaluating and Modelling Ecosystem Service Loss of Coal Mining: A Case Study Mentougou District of Beijing, China*. (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476945X11000031>)
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara. 1996-2006. *Daftar Luas Usaha Pertambangan*, Tenggarong.
- Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BLHD), 2007
- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2010
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Provinsi Kalimantan Timur. 2011. *Inventarisasi Kawasan Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- Muta'ali, lutfi. 2012. *Kapita Selekta Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. 2011. *Kutai Kartanegara dalam Angka*. Tenggarong: BPS

Buku prosiding ini adalah kumpulan makalah narasumber dan peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia XVI di Banjarmasin, didalamnya memuat aneka konsep, metode, dan aplikasi geografi dari masing-masing wilayah, sehingga buku ini adalah miniatur yang menggambarkan kebhinekaan obyek kajian dalam memberikan alternatif pemecahan masalah di wilayah NKRI.

Geografi adalah Ilmu yang mempelajari fenomena geosfer (obyek material) dengan pendekatan (obyek formal) yakni Keruangan (*Spatial*), Ekologi (*Ecological*), dan Kompleks Wilayah (*Regional Complex*)



Geografi sebagai gatra pertama dalam Astagatra Ketahanan Nasional adalah fakta bahwa prinsip geografi merupakan komponen sangat penting dalam membentuk karakter pemimpin bangsa, akan tetapi sangat ironis saat ini di dunia pendidikan kita yang sedang mengembangkan kurikulum baru tahun 2013, dimana Geografi tidak termasuk mata pelajaran yang wajib diajarkan, akan tetapi hanya menjadi pilihan semata. Pertanyaan yang muncul, apakah untuk menjaga kedaulatan negara merupakan pilihan semata atau menjadi sangat wajib bagi setiap individu bangsa?

**Prof. Dr. Suratman, M.Sc.**  
(Ketua Umum IGI)



Peran Geograf (*Why Care*) untuk pembangunan berkelanjutan akan menuntun keberadaan NKRI. Penyebaran dan peningkatan SDM Geografi keseluruhan wilayah NKRI menjadi suatu keharusan dan mendesak.

**Ir. Idwan Suhardi, Ph.D**  
(Staf Ahli Kemristek RI Bidang Energi Sumberdaya & Material Maju)



Informasi Geospasial membantu penyiapan SDM Geospasial yang terdiri dari Sarjana Geografi dan Sarjana Pendidikan Geografi. Oleh karena itu UU Informasi Geospasial menjadi modal utama para geografer baik sebagai profesional geografi maupun profesional pendidik geografi dalam membangun Kecerdasan Geospasial Nasional.

**Dr. Asep Karsidi, M.Sc.**  
(Kepala Badan Informasi Geospasial)